

Manajemen Usulan Kenaikan Pangkat ASN Berbasis Digital dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Kabupaten Blitar

Dwi Anjarsari, Ratna Dewi Mulyaningtiyas, Sonny SM Laksono

Magister Manajemen, Universitas Islam Kadiri

Magister Agribisnis, Universitas Islam Kadiri

email: dwi.anjarsari@gmail.com

Abstrak

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut mencakup seluruh aktivitas yang saling berkaitan. Misalnya dalam pengolahan data, pengelolaan informasi serta sistem manajemen. Perkembangan teknologi informasi dengan menerapkan konektivitas internet dalam tata kelola pemerintahan diharapkan mampu mengatasi berbagai macam persoalan melalui peningkatan efisiensi, inovasi, produktivitas, perluasan jangkauan dan penghematan biaya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif, menurut Sugiyono (2018) penelitian kualitatif. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Blitar, Informan sebanyak 3 orang. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Blitar. Waktu penelitian pada Bulan Januari sampai Maret Tahun 2024. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Data sekunder merupakan data yang didapatkan oleh peneliti secara tidak langsung dan bersumber dari data yang sudah ada seperti perpustakaan yang berupa laporan penelitian terdahulu. Metode analisis data menggunakan analisis model data interaktif dimana data kualitatif diolah dengan interaktif serta berjalan dengan berkelanjutan sampai data jenuh, aktivitas analisa data terdapat 3 proses : kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dalam penelitian ini adalah Badan Kepegawaian Negara telah melakukan usaha yang optimal dalam membantu mensukseskan sistem paper less, dapat dilihat dari alur mekanisme/posedure kenaikan pangkat yang jelas dan terbuka, adanya buku saku SIASN untuk lebih membantu kabupaten/kota serta telah sesuai dengan SOP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Blitar, Persyaratan kenaikan pangkat baik teknis maupun administrasi tidak ada perubahan sama sekali dari sebelum paper less dan sesudah paper less. Hanya saja bentuk fisiknya berbeda. Faktor penghambat pelayanan kenaikan pangkat melalui SIASN ini adalah data yang masih belum akurat, hasil dari scan data yang masih belum sempurna serta sarana dan prasarana yang masih kurang memadai. Serta SDM yang masih belum siap dengan perubahan sistem ini. Faktor pendukung pelayanan kenaikan pangkat melalui sistem SIASN ini adalah kesiapan dari para pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Blitar dengan adanya perubahan khususnya pada pelayanan kenaikan pangkat yang sekarang menjadi paper less ini, adanya motivasi dan semangat kerja.

Kata Kunci: Manajemen Usulan Kenaikan Pangkat, Sistem Informasi Aparatur Sipil

Abstract

The use of information and communication technology in government processes can increase efficiency, effectiveness, transparency and accountability in government administration. The use of information and communication technology covers all interrelated activities. For example, in data processing, information management and management systems. The development of information technology by implementing internet connectivity in government governance is expected to be able to overcome various problems through increasing efficiency, innovation, productivity, expanding reach and saving costs. The research method used is qualitative research, according to Sugiyono (2018) qualitative research. The object of research in this study was the Blitar Regency Personnel and Human Resources Agency. There were 3 informants. The location of the research was Blitar Regency. The research time is January to March 2024. The data sources in this research are primary and secondary data. Primary data was obtained using interview and documentation methods. Secondary data is data obtained by researchers indirectly and comes from existing data such as libraries in the form of previous research reports. The data analysis method uses interactive data model analysis

where qualitative data is processed interactively and runs continuously until the data is saturated. Data analysis activities consist of 3 processes: data condensation, data presentation and drawing conclusions. The results of this research are that the State Civil Service Agency has made optimal efforts to help make the paper less system a success, it can be seen from the clear and open flow of promotion mechanism/proposed, the existence of a SLASN pocket book to further assist districts/cities and is in accordance with the Agency's SOP Blitar Regency Personnel and Human Resources Development, Requirements for promotion, both technical and administrative, have not changed at all from before paper less and after paper less. It's just that the physical form is different. The inhibiting factors for promotion services through SLASN are data that is still inaccurate, results from data scans that are still imperfect and facilities and infrastructure that are still inadequate. And human resources are still not ready for this system change. The supporting factors for promotion services through the SLASN system are the readiness of the employees of the Blitar Regency Personnel and Human Resources Development Agency with changes, especially in the promotion service which is now paper less, the existence of motivation and work enthusiasm.

Keywords: Promotion Proposal Management, Civil Service Information System.

Pendahuluan

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut mencakup seluruh aktivitas yang saling berkaitan. Misalnya dalam pengolahan data, pengelolaan informasi serta sistem manajemen. Perkembangan teknologi informasi dengan menerapkan konektivitas internet dalam tata kelola pemerintahan diharapkan mampu mengatasi berbagai macam persoalan melalui peningkatan efisiensi, inovasi, produktivitas perluasan jangkauan dan penghematan biaya.

Badan kepegawaian negara sebagai pembinaan penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara memiliki fungsi *untuk* menyempurnakan, memelihara dan mengembangkan administrasi negara di bidang kepegawaian sehingga tercapai jalannya pemerintahan. Dalam rangka menginternalisasi target tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) khususnya mengenai integrasi dan satu data ASN dibangunlah Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) sebagai wujud manajemen dan implementasi amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen Pegawai Negeri Sipil. SIASN sebagai wadah pelaksanaan layanan manajemen Aparatur Sipil Negara, memiliki beberapa fungsi yang salah satunya merupakan Layanan

Kepangkatan. Di tahun 2023 ini, terdapat 225 Daerah yang terdiri dari Kabupaten dan Kota layanan kenaikan pangkatan menggunakan SIASN, sedangkan Pemerintah Kabupaten Blitar menggunakan SIASN mulai periode 1 April 2023 dan periode 1 Oktober 2023 ini.

Sebagai salah satu kabupaten yang menggunakan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN), pengusulan kenaikan pangkat Periode April 2023 menjadi kali pertama penggunaan SIASN sebagai media layanan kepangkatan, pensiun dan mutasi antar daerah. Pada pelaksanaannya masih ditemukan beberapa permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan usul kenaikan pangkat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kabupaten Blitar periode April dan Oktober 2023. Sehingga peneliti tertarik menuangkannya kedalam sebuah penelitian agar dapat mengetahui, memahami dan menganalisa manajemen usulan kenaikan pangkat ASN berbasis digitalisasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil (SIASN) serta sebagai bahan masukan dan saran bagi Badan Kepegawaian Negara khususnya bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Blitar agar dapat dilakukan perbaikan secara berkesinambungan terhadap hambatan-hambatan yang ditemukan pada saat usul kenaikan pangkat di pemerintah kabupaten Blitar periode-periode tahun berikutnya.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif, menurut Sugiyono (2018) penelitian kualitatif adalah penelitian dengan metode yang memiliki landasan

filsafat dalam meneliti keadaan ilmiah dimana instrumennya adalah peneliti itu sendiri. Melihat permasalahan yang telah dipaparkan, maka peneliti menggunakan rancangan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Secara sistematis yang mudah untuk dipahami. Fokus penelitian ini diantaranya :

1. Bagaimana manajemen Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi manajemen usulan kenaikan pangkat dalam Study Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN)?
3. Bagaimana solusi dalam menghadapi hambatan-hambatan pada usulan kenaikan pangkat yang dilakukan

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Pemerintah kabupaten Blitar di Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN)? Peneliti menjadi tokoh utama dalam penelitian ini karena menjadi alat pengumpul data yang utama. Peneliti disebut sebagai instrumen kunci utama dalam pengungkapan fakta dan harus terlibat dengan permasalahan yang ada didalam objek penelitian. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Blitar. Informan sebanyak 3 orang yaitu Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Blitar, Kepala Bidang Mutasi serta User atau Pengelola Kenaikan pangkat ASN.

Lokasi penelitian dilakukan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Blitar. Waktu penelitian pada Bulan Januari sampai Maret Tahun 2024. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Data sekunder merupakan data yang didapatkan oleh peneliti secara tidak langsung dan bersumber dari data yang sudah ada seperti perpustakaan yang berupa laporan penelitian terdahulu. Metode analisis data menggunakan analisis model data interaktif dimana data kualitatif diolah dengan interaktif serta berjalan dengan berkelanjutan sampai data jenuh, aktivitas analisa data terdapat 3 proses : kondensasi

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Badan Kepegawaian Negara semakin meningkatkan pelayanannya dibidang kepegawaian dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Salah satu inovasi yang dibuat oleh Badan Kepegawaian Negara adalah dengan membuat sebuah aplikasi yaitu Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian dengan maksud dan tujuan untuk lebih membantu para pegawai PNS. Khususnya dalam pelayanan kenaikan pangkat. Saat ini melalui SIASN tersebut, Badan Kepegawaian Negara membuat sebuah sistem baru yaitu kenaikan pangkat berbasis paper less. Hal ini adalah salah satu cara Badan Kepegawaian Negara dalam memaksimalkan pelayanannya. Adanya sistem ini membuat mekanisme/prosedur pelayanan kenaikan pangkat mengalami perubahan. Perubahan prosedur menjadi lebih singkat dan lebih efisien karena hanya dengan melalui SIASN saja para pegawai bisa mengakses data dimana saja dan kapan saja tidak perlu lagi membawa berbagai macam berkas kepada instansi di daerah masing-masing.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (KepMenPAN) Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa dalam menentukan keberhasilan kesesuaian persyaratan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, yaitu: adanya kejelasan persyaratan pelayanan baik teknis maupun administrasi dan adanya keterbukaan mengenai persyaratan pelayanan. Pelayanan kenaikan pangkat pegawai melalui SIASN memiliki kesesuaian persyaratan yang terdiri atas persyaratan teknis dan administrasi

Sebelum menggunakan sistem paper less berkas yang harus dibawa oleh pegawai yaitu: surat pengantar nota usul kenaikan pangkat reguler, nota usul kenaikan pangkat individu, SK kenaikan pangkat dalam 2 tahun terakhir, penilaian angka kredit, SK jabatan terakhir serta melampirkan ijazah dan surat ijin atau tugas belajar, sedangkan kenaikan pangkat berbasis paper less sekarang persyaratan-persyaratan yang telah disebutkan discan oleh pegawai dan hanya membawa dua berkas saja yaitu surat pengantar nota usul kenaikan pangkat reguler dan sasaran kerja pegawai. persyaratan pelayanan kenaikan

pangkat tidak mengalami perubahan baik sebelum menggunakan sistem paper less maupun setelah menggunakan sistem paper less, hal ini dikarenakan persyaratan pelayanan kenaikan pangkat telah diatur ke dalam peraturan undang-undang dan peraturan Badan Kepegawaian Negara. Penyampaian informasi terhadap berkas batal juga sangat cepat disampaikan oleh BKPSDM Kabupaten Blitar.

Sebuah inovasi tentunya memiliki beberapa faktor dalam perjalanannya, program pelayanan milik pemerintah yang berbasis teknologi pun terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya, baik faktor penghambat ataupun faktor pendukung program pelayanan itu sendiri. Pada hasil penelitian di lapangan, ditemukan beberapa faktor penghambat dan faktor pendukung pada program layanan ini diantaranya, sebagai berikut :

- a. Faktor Penghambat yang diantaranya adalah sumber daya manusia yang berbeda-beda latar belakang, kemampuan yang dipunya oleh SDMnya sendiri juga berbeda-beda dan kemauan dari masing-masing dan data Kenaikan pangkat berbasis sistem paper less ini juga sangat dipengaruhi oleh keakuratan data. Sebagian besar data dari para pegawai masih belum terintegrasi dengan data di BKN. Hal ini dikarenakan, para pegawai belum meng- upgrade data terbarunya.
- b. Faktor pendukung dalam kenaikan pangkat berbasis paper less ini tidak banyak dikatakan. Faktor internal menjadi salah satu faktor pendukung dari sistem ini yaitu pegawai BKPSDM sudah paham dan mendukung sistem kenaikan pangkat berbasis paper less serta pegawai BKPSDM Kabupaten Blitar yang sudah sangat siap dalam menjalankan sistem kenaikan pangkat berbasis paper less. Adanya motivasi dan semangat kerja dari para pegawainya juga menjadi salah satu faktor pendukung jalannya sistem.

Daftar Pustaka

Fitriani, Nur Laila. 2013. Pengaruh SK Menpan Nomor

132/Kep/M.Pan/12/2002 Tentang jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. Semarang : Universitas Diponegoro

Husada, Bella. 2019. Peran Teknologi Informasi Terhadap Pelayanan Publik.

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002

Noviyanti, N. M., Raka, A. A. G., Ayu, A. A., & Larantika, D. (2021). Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik Implementasi E - Government dalam Proses Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah di Kabupaten Badung berbasis elektronik dalam meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien (PAD). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD , semakin besar kepatuhan pajak atau tax compliance , khususnya bagi pajak daerah. Perlu adanya integrasi pengelolaan administrasi, baik administrasi pemerintahan maupun administrasi bisnis . 6(2), 85–96. Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara.

Peraturan badan kepegawaian negara nomor 3 tahun 2023 tentang angka kredit, kenaikan pangkat dan jenjang jabatan fungsional.

Sugiyono (2019) Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D. Bandung: ALFABETA. Tanggal 24 Juni 2022 Tentang Daftar Instansi Pilot Project KP SIASN Periode 1 Oktober 2022.

Thoah, Miftah, 2008, Birokrasi dan Politik, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. Thoah, Miftah, MPA. 2005. Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia. PT. Kencana. Jakarta.

- Tika, Pabundu. 2008. Budaya Organisasi Dan Peningkatan Kinerja Perusahaan. Jakarta : bumi Aksara.
- Ulbert Silalahi. 2003. Studi Tentang Ilmu Administrasi. Bandung: Sinar Baru Aglesindo.
- Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
- Usman Effendi, Asas Manajemen, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 1
- Utomo, Warsito, 2006, Administrasi Publik Baru, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Widodo, Joko. 2008. Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja. Malang Jawa Timur: Bayu Media Publishing
- Virgoreta, D. A., Pratiwi, R. N., Publik, J. A., Administrasi, F. I., & Brawijaya, U. (n.d.). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Desa Beji Kecamatan Jenu , Kabupaten Tuban). 2, 1–5.
- Winarsih, Ratminto. 2006. Manajemen Pelayanan, Pengembangan Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal. Yogyakarta: pustaka pelajar.
- Winda sari, Penerapan Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Pepustakaan” Jurnal Ilmu Informasi Kepustakaan dan Kearsipan”, Volume 1 Nomor 1, edisi September 2012, hal. 41
- Yuosa, 2002, Indikator Kinerja Pemerintah Daerah: Pendekatan Manajemen dan Kebijakan, Jakarta, Binarupa Aksara